

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merupakan lembaga penelitian pertama, terbesar dan terbaik di Indonesia. LIPI memiliki visi menjadi lembaga ilmu pengetahuan berkelas dunia dalam penelitian, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan daya saing bangsa, sesuai dengan motto LIPI yaitu Integritas, Ilmiah, dan Unggul (Humas LIPI, 2018).

Dalam Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Inspektorat adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LIPI dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan LIPI.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala LIPI;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

1.2 Latar Belakang Penelitian

The Fourth Industrial Revolution atau dikenal dengan istilah Revolusi Industri 4.0 pada hakikatnya merupakan sebuah era baru dalam tahapan globalisasi yang ditandai dengan sejumlah ciri, yaitu penggunaan *Internet of Things (IoT)*, *big data*, otomasi, robotika, komputasi awan, hingga inteligensi artifisial (*Artificial Intelligence*).

Revolusi Industri 4.0 adalah fase terkini yang harus dihadapi oleh semua pihak, tidak terkecuali bagi pemerintahan Indonesia. Para aparatur dipaksa untuk beradaptasi terhadap transformasi teknologi agar fungsi pelayanan publik bisa lebih efisien, tepat dan cepat (Faedlulloh et al., 2020). Dalam menghadapi perubahan tersebut, Reformasi Birokrasi menjadi program yang diharapkan Pemerintah untuk menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0.

Reformasi Birokrasi tidak dapat dipisahkan dari tujuan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) memiliki karakteristik yaitu transparan, akuntabel, adil, wajar, demokratis, partisipatif, dan responsif (Yunarto, 2014).

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional. Gambar 1.1 merupakan Gambar *Grand Design* Reformasi Birokrasi.



Gambar 1.1. *Grand Design* Reformasi Birokrasi

(Sumber : Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010)

Berdasarkan *Grand Design* Reformasi Birokrasi, diharapkan pada tahun 2024, Pemerintah Indonesia memiliki kualitas pemerintahan kelas dunia yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi (Presiden RI, 2010). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) termasuk lembaga yang berkomitmen untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di semua lini (Humas LIPI, 2019). Sekretaris Utama LIPI, menyatakan bahwa setiap layanan selalu dievaluasi untuk lebih dapat meningkatkan pelayanan kepada publik. Evaluasi layanan dan arah Reformasi Birokrasi melalui *Good Governance*, secara lembaga dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Monitoring dan evaluasi berkala diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assesment*) oleh Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah, yang mencakup penilaian terhadap dua komponen: Pengungkit (*Enablers*) dan Hasil (*Results*) (Itjen, 2021). Skor indeks Reformasi Birokrasi yang telah dievaluasi oleh APIP akan dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Gambar 1.2 merupakan Gambar skor hasil penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LIPI dari tahun 2016-2021.



Gambar 1.2. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi LIPI tahun 2016-2020
(Sumber: Laporan Kinerja LIPI Tahun 2020)

Gambar I.2. menunjukkan indeks Reformasi Birokrasi di LIPI selama lima tahun yaitu 2016 sampai dengan 2020. Capaian indeks reformasi birokrasi tahun 2016 adalah 66,75 (dari target 70), tahun 2017 adalah 74,32 (dari target 78), tahun 2018 adalah 77,07 (dari target 80), tahun 2019/2020 adalah 78,08 (dari target 80). Data tersebut menunjukkan bahwa LIPI memiliki komitmen terhadap implementasi Reformasi Birokrasi yang mengalami peningkatan indeks dari tahun ke tahun, namun nilai Reformasi Birokrasi LIPI tidak pernah mencapai target yang ditentukan. Oleh karena itu, kinerja pengawasan internal yang dilakukan oleh auditor untuk melakukan pengawasan pelaksanaan manajemen pemerintahan dalam mencapai *Good Governance* diperlukan dalam membantu manajemen untuk mencapai target nilai Reformasi Birokrasi (Masdan et al., 2017).

Dalam implementasi lainnya, yaitu pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yang termasuk dalam unsur Reformasi Birokrasi yaitu penguatan pengawasan dan kapabilitas APIP. LIPI masih mendapatkan beberapa temuan berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK RI. Laporan kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dari tahun 2005 hingga tahun 2020, BPK RI memberikan 644 rekomendasi kepada LIPI, dan terdapat 532 rekomendasi yang dinyatakan sesuai (82,6%), 104 rekomendasi dinyatakan belum sesuai (16,15%), dan 8 rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti (1,24%). Rekomendasi ini selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh masing-masing unit kerja dengan melakukan tindakan koreksi.

Rekomendasi yang belum sesuai dari tahun 2005 merupakan rekomendasi yang melibatkan pihak ketiga serta memiliki kompleksitas dalam penyelesaiannya sehingga sulit untuk diselesaikan. Untuk mencegah rekomendasi yang tidak dapat diselesaikan karena kompleksitas yang rumit, maka proses audit perlu untuk dibenahi, khususnya meningkatkan proses pencatatan tindak lanjut di LIPI. Saat ini, proses pencatatan tindak lanjut hasil audit masih dilakukan dengan menggunakan *excel* dan *google drive* untuk penyimpanan data. Sampai saat ini, Inspektorat sebagai unit kerja auditor tidak

memiliki sistem informasi terintegrasi yang dapat menginventarisasi semua data terkait dengan temuan, rekomendasi, dan hasil yang sudah maupun belum ditindak lanjuti, sehingga auditor masih memiliki keterbatasan dalam hal mengetahui progress laporan, histori serta tidak dapat dimonitoring setiap saat oleh pimpinan, sehingga waktu yang digunakan untuk menyerahkan laporan tindak lanjut hasil audit yaitu sebanyak 13 hari. dan waktu yang digunakan untuk menyerahkan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebanyak 78 hari. Hal ini, dapat mengakibatkan terhambatnya kinerja auditor terkait dengan efektivitas dan kemudahan dalam bekerja. Oleh karena itu, diperlukan teknologi informasi untuk mendukung percepatan kinerja auditor dalam kegiatan tindak lanjut tersebut, yaitu dengan meningkatkan *response time* maupun *report time*.

Dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan, pengawasan menjadi salah satu aspek penting yang ditunjukkan dengan beberapa program penguatan pengawasan. Rencana Kerja Reformasi Birokrasi LIPI Tahun 2020 menargetkan peningkatan kapabilitas APIP menjadi level 3, peningkatan maturitas SPIP menjadi level 3, meningkatnya kesadaran anti korupsi melalui target Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi level 4, peningkatan tata kelola pengelolaan barang dan jasa yang efektif dan akuntabel melalui Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa menuju level 3 (Proaktif). Sebagian besar program penguatan pengawasan tersebut menjadi tanggung jawab dari inspektorat LIPI sebagai unit kerja auditor internal di LIPI yang juga melibatkan unit lainnya.

Kinerja auditor internal juga didorong oleh beberapa faktor diantaranya penerapan teknologi informasi, pengembangan kompetensi, dan komunikasi audit intern. Berdasarkan penelitian Wulandari dan Prasetya, (2020) mengenai Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi dan Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor bahwa terdapat pengaruh yang signifikan teknologi informasi, profesionalisme, teknologi informasi terhadap kinerja auditor pada KAP di Jakarta Barat. Kinerja auditor yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dapat meningkatkan keahliannya dalam

menyelesaikan pekerjaannya. Teknologi informasi merupakan kombinasi teknologi dan komunikasi dalam bentuk perangkat lunak dan perangkat keras yang dapat digunakan untuk melakukan pengolahan, pemrosesan, penyusunan, penyimpanan, dan proses manipulasi data guna mendapatkan informasi yang akurat (relevan, baik dan tepat waktu), sehingga dapat digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk menghasilkan informasi strategis dalam pengambilan keputusan (Purba et al., 2020). Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang mampu memberikan informasi kepada orang lain secara cepat dan dapat diakses secara luas tanpa batas ruang maupun waktu, artinya dapat diakses kapan dan di mana saja, sehingga dengan informasi tersebut mampu menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat (Simarmata et al., 2020). Sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian Krieger menekankan pentingnya kemajuan teknologi perusahaan audit terkait dengan kemampuan dalam menganalisis data; kemampuan teknologi dalam tim audit yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung ide-ide dalam penggunaan analisis data tingkat lanjut (Krieger et al., 2021).

Sistem Informasi Terintegrasi atau *Enterprise Resource Planning* (ERP) adalah rangkaian perangkat lunak yang digunakan untuk mengintegrasikan berbagai fungsi yang berbeda (O'Leary, 2000). Enterprise Resource Planning (ERP) adalah sebuah perangkat lunak sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk mengakomodasikan kebutuhan – kebutuhan sistem informasi secara spesifik dengan mengintegrasikan dan mengendalikan seluruh proses bisnis yang ada dalam suatu organisasi (Wibisono, 2005).

Penelitian Istiariani menyebutkan tiga faktor penting yang menunjang kinerja auditor. Penelitian tersebut mengkaji pengaruh Independensi, Profesionalisme dan Kompetensi terhadap Kinerja Auditor BPKP (Studi Kasus pada Auditor BPKP Jateng), bahwa independensi, profesionalisme, dan kompetensi auditor mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Istiariani, 2018). Menurut Putro, (2014) dalam melaksanakan tanggung jawabnya, auditor harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, kompetensi lain serta kriteria tertentu

dari kualifikasi pendidikan formal auditor yang diperlukan untuk penugasan audit intern, sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi auditan. Auditor wajib meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta kompetensi lain melalui pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (*continuing professional education*) guna menjamin bahwa kompetensi yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan APIP dan perkembangan lingkungan pengawasan. Aturan tentang tingkatan pendidikan formal minimal dan kualifikasi yang diperlukan harus dievaluasi secara periodik guna menyesuaikan dengan situasi dan kondisi auditan.

Selain kompetensi yang dimiliki, komunikasi menjadi faktor penting dalam menopang kinerja auditor. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan berita antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga dipahami apa yang dimaksudkan. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai transmisi informasi dan pemahaman melalui penggunaan simbol-simbol biasa atau umum. Komunikasi merupakan bagian integral dalam audit intern. Mulai dari perencanaan penugasan, pelaksanaan pengujian, hingga pemantauan tindak lanjut, semuanya memerlukan keterampilan berkomunikasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Melalui komunikasi yang baik, akan diperoleh bukti audit yang cukup dan valid, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat simpulan audit (Purnama et al., 2014).

Peningkatan kinerja pengawasan yang dilakukan oleh auditor intern di dalam suatu organisasi, membantu manajemen untuk mencapai tujuan organisasi yang dilaksanakan melalui pemberian jaminan (*assurance activities*) dan layanan konsultasi (*consulting activities*) sesuai standar, sehingga memberikan perbaikan efisiensi dan efektivitas atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern organisasi..

Pengendalian intern yang kuat merupakan salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat membantu instansi pemerintah mencapai tujuannya melalui manajemen risiko yang sejalan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Efektivitas APIP dapat

memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (Administrasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI, 2019). Berdasarkan paparan sebelumnya, APIP memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan pelaksanaan manajemen pemerintahan yang berkaitan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui *Good Governance*.

Berdasarkan nilai Reformasi Birokrasi LIPI selama lima tahun, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tidak pernah mencapai target yang ditentukan, dan berdasarkan laporan kegiatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang menunjukkan bahwa dari tahun 2005 hingga tahun 2020, BPK memberikan 644 rekomendasi kepada LIPI, dan terdapat 532 rekomendasi yang dinyatakan sesuai (82,6%), 104 rekomendasi dinyatakan belum sesuai (16,15%), dan 8 rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti (1,24%), serta berdasarkan sistem informasi terintegrasi yang tidak dimiliki oleh inspektorat sebagai unit kerja auditor, sehingga auditor memiliki keterbatasan dalam bekerja yang dapat mengakibatkan terhambatnya kinerja auditor terkait dengan efektivitas dan kemudahan dalam bekerja. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kinerja pengawasan yang dilakukan oleh auditor intern di dalam suatu organisasi untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Jika pemahaman *Good Governance*, penerapan teknologi informasi, pengembangan kompetensi, dan komunikasi audit intern berpengaruh positif terhadap kinerja, maka hasilnya akan berbanding lurus. Nilai positif pada peningkatan pemahaman *Good Governance*, penerapan teknologi informasi, pengembangan kompetensi, dan komunikasi audit intern tersebut akan mengakibatkan peningkatan pada kinerja auditor intern. Hal ini dapat menjadi dasar bagi auditor intern untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Terintegrasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Auditor di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.”

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor yang terdiri dari Good Governance, Penerapan Teknologi Informasi, Pengembangan Kompetensi, dan Komunikasi Audit Intern berpengaruh terhadap Kinerja Auditor di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia?
2. Bagaimana perancangan sistem informasi terintegrasi tindak lanjut hasil pemeriksaan berdasarkan faktor yang berpengaruh terhadap Kinerja Auditor di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang terdiri dari *Good Governance*, Penerapan Teknologi Informasi, Pengembangan Kompetensi, dan Komunikasi Audit Intern yang berpengaruh terhadap Kinerja Auditor di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
2. Mengusulkan perancangan sistem informasi terintegrasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berdasarkan faktor yang berpengaruh terhadap Kinerja Auditor di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kinerja auditor LIPI dengan mendukung percepatan kinerja auditor secara *response time* maupun *report time* serta dapat dimonitoring oleh stakeholder baik itu sesama rekan auditor, inspektur, auditi, tim penyelesaian tuntutan ganti rugi, tim pemantauan tindak lanjut, Kepala LIPI, maupun BPK RI.

1.6 Sistematika Penulisan

Berisi tentang sistematika dan penjelasan ringkas laporan penelitian karya ilmiah dari Bab I sampai Bab V

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi: Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tesis.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis dan ruang lingkup.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu Kinerja Auditor, dan empat variabel independen yaitu Pemahaman *Good Governance*, Penerapan Teknologi Informasi, Pengembangan Kompetensi, Komunikasi Audit Intern. Kemudian dilakukan perancangan kuesioner dengan menggunakan skala likert 1-6 serta dilakukan penyebaran kuesioner dengan menggunakan media *Google Form*. Hasil kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya dan dilakukan pengujian hipotesis menggunakan PLS SEM. Selanjutnya, mengidentifikasi kebutuhan usulan perancangan percepatan penyusunan laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berdasarkan faktor yang berpengaruh terhadap Kinerja Auditor di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jika, faktor-faktor Pemahaman *Good Governance*, Penerapan Teknologi Informasi, Pengembangan Kompetensi, dan Komunikasi Audit Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Auditor, maka dilakukan perancangan sistem informasi terintegrasi yang terdiri dari perancangan diagram konteks, perancangan DFD Level 0, Perancangan *Entity Relationship Diagram* (ERD), dan perancangan tampilan antarmuka sistem yang dapat meningkatkan kinerja auditor LIPI dengan mendukung

percepatan kinerja auditor secara *response time* maupun *report time* serta dapat dimonitoring oleh stakeholder baik itu sesama rekan auditor, inspektur, auditi, tim penyelesaian tuntutan ganti rugi, tim pemantauan tindak lanjut, Kepala LIPI, maupun BPK RI .

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian pada keempat variabel independen yaitu (Pemahaman *Good Governance*, Penerapan Teknologi Informasi, Pengembangan Kompetensi, Komunikasi Audit Intern) terhadap satu variabel dependen yaitu kinerja auditor memiliki pengaruh positif dan signifikan. Sehingga, usulan perancangan sistem informasi terintegrasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang terdiri dari perancangan diagram konteks, perancangan DFD Level 0, Perancangan *Entity Relationship Diagram* (ERD), dan perancangan tampilan antarmuka sistem dapat dilanjutkan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Faktor-faktor yang terdiri dari Pemahaman *Good Governance*, Penerapan Teknologi Informasi, Pengembangan Kompetensi, Komunikasi Audit Intern memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Auditor. Hasil pengolahan data didapatkan nilai koefisien jalur dengan arah positif. Penerapan Teknologi Informasi memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Auditor setelah urutan dari faktor *Good Governance* dan Komunikasi Audit Intern, sehingga dibutuhkan usulan perancangan sistem informasi terintegrasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang terdiri dari Perancangan Diagram Konteks, Perancangan DFD Level 0, Perancangan *Entity Relationship Diagram* (ERD), Perancangan Tampilan Antarmuka Sistem untuk mendukung percepatan kinerja auditor.